

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahrum, Shaifuddin dan Lisungan, Joni S., 2009, *Bangunan Sosial Tongkonan (Sebuah Kajian Terhadap Organisasi Sosial Tradisional di Tana Toraja)*, Direktorat Jenderal nilai Budaya, Seni dan Film, Jakarta.
- Holleman, J.F (Ed.), 1981, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, Springer-science+Business Media, Batavia.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Penemuan Hukum*, UAJY, Yogyakarta,
- Nugroho, Sigit S., 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Pide, Suriyaman M, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Penemuan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Puspitasari, Ellyne D., 2019, *Hukum Adat Suku Toraja*, Jakad Publishing, Surabaya.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi Ketiga*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Gunung agung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 43/Pdt.G/2010/PN.MKL, Perihal Gugatan Perkara Perdata Kalebu Toding Allo, 20 Januari 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 74/PDT.G/2011/PN.MKL, Perihal Gugatan Perkara Perdata A.T. Linggi' Allo-Dk., 2 April 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 49/PDT.G/2013/PN.MKL, Perihal Gugatan Perkara Perdata Lince Tallo' Arrang-Dkk., 5 Mei 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 61/PDT.G/2014/PN.MKL, Perihal Gugatan Perkara Perdata Paulina Lantang Ne' Gebi-Ddk., 23 Juni 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 182/PDT.G/2018/PN.MAK, Perihal Gugatan Perkara Perdata Ambe Dian-Dk., 18 Juli 2019

D. Karya Ilmiah

Amrullah, Andi, 2007, "Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Watampone", *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Caesar, Achmad, 2021, "Pendekatan Formalistik Dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah". *Skripsi* Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Herianto, Dwi, 2019, "Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan (Studi Kasus Di Kabupaten Toraja Utara)", *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soelistyowati, 2016, "Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pewarisan pada Masyarakat Parental di Jawa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia”. *Disertasi* Program Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Jurnal

Christianto, Hwian, “Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana Adat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42* No.2 April - Juni 2012 .

Sudarso, Prabowo, “Kedudukan Tanah Tongkonan dalam Hukum Tanah Positif”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Volume 12, Nomor 5, 1982.

I Ketut Sudantra, “Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 4, 2018.

F. Internet

Maria S.W. Sumardjono, “Ihwal Hak Komunal atas Tanah”, diakses melalui <https://properti.kompas.com/read/2015/07/06/150450221/Ihwal.Hak.Komunal.atas.Tanah?page=all>, pada tanggal 18 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.web.id/komunal>, tanggal 20 April 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.web.id/komune>, tanggal 20 April 2022